

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aria Zurnetti, Nani Mulyati, dan Fella Hermayenti. 2021. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat (Studi Hukum Adat Minangkabau)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Mengenal Lebih Dekat BPK, Sebuah Panduan Populer*. Jakarta: Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Deassy J.A Hehanussa Et. Al. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Parsada.
- Dicky Anandya, Kurnia Ramadhana. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Indonesia Corruption Watch*.
- Edita Elda. 2021. *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Eddy Riffal. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung
- Elwi Danil. 2012. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- EQ. RM. Surachman, Jan S. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Erdianto Effendi. 2022. *Problematisasi Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Evi Hartati. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gusti Ketut Ariawan. 2015. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta: Kepel Press.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.

Maruarar Siahaan. 2020. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan R. Muhammad Mahradi. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Nursya. 2020. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku pada Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*. CV. Alungadan Mandiri.

O.C. Kaligis. 2006. *Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno. 2005. Bumi Aksara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 134 Tahun 2001, TLN No.4150).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN No. Tahun 2003, TLN No. 4286).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 98).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6049).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 8642).

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (LN No. 35 Tahun 2023).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli (LN No. 97 Tahun 2020, TLN No. 6488).

Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal

Arianca Boboy, Saryono Yohanes, dan Aksi Sinurat, 2021. "Kewenangan Badan Pengawasan dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Sibatik Journal*. Vol. 1, No.1.

Arqi Nur Mubarak. Wahyu Priyanka Nata Permana. 2024. "Implementasi Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 Jo. SEMA 2 Tahun 2016 dalam Putusan Pengadilan Tipikor. *Journal Portal Universitas Islam Indonesia*.

Baehaqi, Eki Sirojul. 2022. "Keturtsertaan dalam Tindak Pidana". *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 1, No. 1.

Christine Juliana Sinaga. 2017. "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sbagai Susidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Wawasan Yuridika, Fakulas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan Bandung*. Vol. 1 No. 2.

Edita Elda. 2019. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2.

Edy Suranta Tariga, Et. Al. 2023. "Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2 No. 2.

- Erlina B dan Faizal Suherman. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)". *Jurnal USM*, Vol. 12 No.1.
- Horas Monang Jeffry, Andi Gultom dan Alpi Sahari. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Doktrin Review*.
- Khofifah Kusuma Wardanil, Ismansyah, dan Aria Zurnetti. 2023. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 120/Pid.Sus/2022)". *Unes Law Review*. Vol.6, No. 2.
- Mohammad Diky Andika Irawan dan Siti Khodijah. 2021. "Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor". *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2, No.3.
- Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Satria Subekti, dan Cahyo Harjo Prakoso. 2019. "Kewenangan Lembaga Hukum dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Prespektif*. Vol. 24, No. 3.
- Sabrina Hidayat, *Et. Al.* 2023. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara". *Halu Oleo Legal Research* Vol. 5, No. 2.
- Tiar Adi Riyanto. 2021. Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*. Vol. 6, No. 3.
- Yohanes, Saryono. 2020. "Dampak Ketidakharmonisan Pengaturan Kekuasaan dan Kewenangan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara dan Daerah dalam Menetapkan dan Menilai Kerugian Keuangan Negara". *Jurnal Hukum Proyuridis*. Vol. 2, No. 2.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pd.

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pd.

Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pd.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pd.

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pd.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

E. Website

Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 16 Mei 2024 Jam 20.10.

Renata Christha Auli, 2024, "Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya Di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>, dikunjungi pada 15 September 2024 Jam 21.00 WIB.

Tim JDIH Pusat BPK. 2018. "Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", dikunjungi pada tanggal 18 Januari Pukul 22.16 WIB, [1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](https://www.jdihtim.pusat.bpk.go.id/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf)

F. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional.

H.M. Fauzan, Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*.

G. Skripsi dan Disertasi

Mhd. Fatria. 2024. "Pengaturan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Institusi Lainnya Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Disertasi* Universitas Andalas. Padang.

Zul Amran Fadhur Rohman. 2021. "Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Padang." *Skripsi* Universitas Andalas. Padang.